

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DP3AP2KB
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 untuk tahun pelaksanaan 2024.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun anggaran 2024, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak kami menyambut baik.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Rote Ndao.

Ba'a, Februari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kab. Rote Ndao



Regina A. V. Kedoh, S.STP,M.Si

Pembinu Utama Muda

NIP. 198008271999122003

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA Perubahan dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) Tujuan, 4 (empat) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8
Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,53	85,28	91,18	Sangat Tinggi
		Capaian Kinerja Tujuan 1				91,18	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Presentase Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	Orang	4,70	7,9	168	Sangat Tinggi
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	49,53	49,07	99	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				133,58	Sangat Tinggi

Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,50	1,58	-102	Sangat Rendah
		Capaian Kinerja Tujuan 2				-102	Sangat Rendah
	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Total fertility rate (TFR)	%	3,40	3,11	108,53	Sangat Tinggi
		Capaian Kinerja Sasaran 2				108,53	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas Dan aksesibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Rasio akseptor KB	%	58,00	50,32	87	Tinggi
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	57,0	50,32	88	Tinggi
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	10	20,30	-83	Sangat Rendah

		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,30	20,04	-258	Sangat Rendah
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				-13,15	Sangat Rendah
Meningkatk an Kualitas Perlindunga n terhadap Perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak;		Presentase Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Oran g	0,06	0,11	69,69	Sedang
		Capaian Kinerja Tujuan 3				69,69	Sedang
	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	97,00	100	103	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4				103	Sangat Tinggi
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					302,22	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 302,22% atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”, dengan rata-rata capaian Tujuan dan rata – rata capaian Sasaran yaitu :

- 1) Capaian kinerja Tujuan **Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan** sebesar 91,18% (*Sangat Tinggi*);
- 2) Capaian kinerja Tujuan **Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk** sebesar 133,58% (*Sangat Tinggi*); dan

- 3) Capaian kinerja Tujuan **Meningkatkan Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak** sebesar - 102% (*Sangat Rendah*);
- 4) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak** sebesar 108,53% (*Sangat Tinggi*); dan
- 5) Capaian Kinerja Sasaran **Terwujudnya Pengendalian Penduduk** sebesar - 13,15% (*Sangat Rendah*).
- 6) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan Kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran** sebesar 69,69% (*Sedang*), dan
- 7) Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak** sebesar 103% (*Sangat Tinggi*).

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran mendekati bahkan ada yang tidak mencapai target dan berhasil namun masih ada hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Rendahnya keikutsertaan ber KB pada PUS;
- 2) PUS yang mengikuti KB sudah mempunyai anak lebih dari dua (2) orang serta adat istiadat yang mempengaruhi sehingga banyak keluarga/PUS yang memiliki anak lebih dari 2 orang;
- 3) Minimnya Pengetahuan Pasangan Usia Subur yang masih rendah;
- 4) Tenaga Penyuluh Lapangan masih sangat kurang;
- 5) Masih ada sebagian PUS yang menganggap KB adalah hal yang tabuh; dan
- 6) Efek samping dari ber – KB (haid tidak teratur, BB meningkat).

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

- 1) Pendewasaan usia perkawinan (21 tahun – 25 tahun);
- 2) Jaga jarak kelahiran;
- 3) Meningkatkan konseling terhadap pasangan usia subur;
- 4) Perlu adanya ditambahkan Penyuluh Lapangan sesuai jumlah desa;
- 5) Meningkatkan pembinaan pada peserta KB aktif;
- 6) Meningkatkan konseling KB bagi PUS;
- 7) Pembinaan Poktan;
- 8) Lebih meningkatkan konseling bagi PUS tentang manfaat dan efek samping; dan
- 9) Meningkatkan pelayanan yang lebih Optimal

Dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.875.616.849,- (*Sembilan Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.8.069.689.129,- (*Delapan Milyard Enam Puluh Sembilan Juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah*) atau sebesar 81,71%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat **Efisiensi** anggaran belanja

dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp.1.805.927.720,- (*Satu Milyard Delapan Ratus Lima Juta sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 18,29% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (302,22%) terhadap realisasi anggaran (0,58%) menunjukkan tingkat efektivitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,04 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja tahun 2024 senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Rote Ndao



Regina A. V. Kedoh, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19800827 199912 2 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	14
E. Sistematika Pelaporan.....	15
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	18
B. Indikator Kinerja Utama	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran	87
BAB IV PENUTUP	104
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
3. POHON KINERJA TAHUN 2024	
4. RENCANA AKSI TAHUN 2024	
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019-2024	
6. CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Golongan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.3	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil	7
Tabel 1.4.	Keadaan Kendaraan Bermotor	10
Tabel 1.5.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya.....	12
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).....	24
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.....	26
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	32
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.....	37
Tabel 3.4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	39
Tabel 3.5.	Data Capaian IPM Perempuan dan IPM Laki-laki Tahun 2024..	39
Tabel 3.6.	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.....	42
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk.....	43
Tabel 3.8.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk.....	46
Tabel 3.9.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.....	47
Tabel 3.10.	Cakupan Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 2024.....	48
Tabel 3.11.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.....	51
Tabel 3.12.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	56

Tabel 3.13.	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2021-2024.....	53
Tabel 3.14.	Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kabupaten Rote Ndao.....	56
Tabel 3.15.	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	58
Tabel 3.16.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengendalian Penduduk.....	59
Tabel 3.17.	Jumlah Total Fertility Rate (TFR dan PUS).....	59
Tabel 3.18.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengendalian Penduduk.....	62
Tabel 3.18.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengendalian Penduduk.....	62
Tabel 3.19.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan Kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran.....	63
Tabel 3.20.	Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Tahun 2024.....	64
Tabel 3.21.	Tabel Rasio Asektor KB Per-Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao.....	71
Tabel 3.22.	Pemakai Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 di Kabupaten Rote Ndao.....	74
Tabel 3.23.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need).....	78
Tabel 3.24.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB, Ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran.....	81
Tabel 3.25.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	83
Tabel 3.26.	Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani.....	84
Tabel 3.27.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani.....	86
Tabel 3.28.	Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi.....	5
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	33
Gambar 3.2 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	36
Gambar 3.3. Trend Persandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rote Ndao.....	40
Gambar 3.4. Tren Data Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2021-2024.....	44
Gambar 3.5. Tren Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2021-2024.....	50
Gambar 3.6. Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2021-2024.....	54
Gambar 3.7. Tren Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (IDG) Tahun 2021-2024	56
Gambar 3.8. Data Jumlah Total Fertility Rate (TFR) Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2024.....	60
Gambar 3.9. Tren Data Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Tahun 2021-2024.....	68
Gambar 3.10. Data Trend Rasio Asektor KB 2021 – 2024.....	72
Gambar 3.11. Data Trend Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 di Kabupaten Rote Ndao 2021 – 2024.....	75
Gambar 3.12. Tren Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) Tahun 2021 – 2024.....	77
Gambar 3.13. Tren Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2021-2024.....	73
Gambar 3.14. Tren Cakupan Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani Tahun 2021 – 2024.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

*T*erselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao pada masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao adalah untuk :

- a. Menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum.

Tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera”.

2. Fungsi.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

3. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao terdiri dari

Kepala Dinas yang didukung oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang berfungsi sebagai *supporting staf*, yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, dan Bidang KB, K3 yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

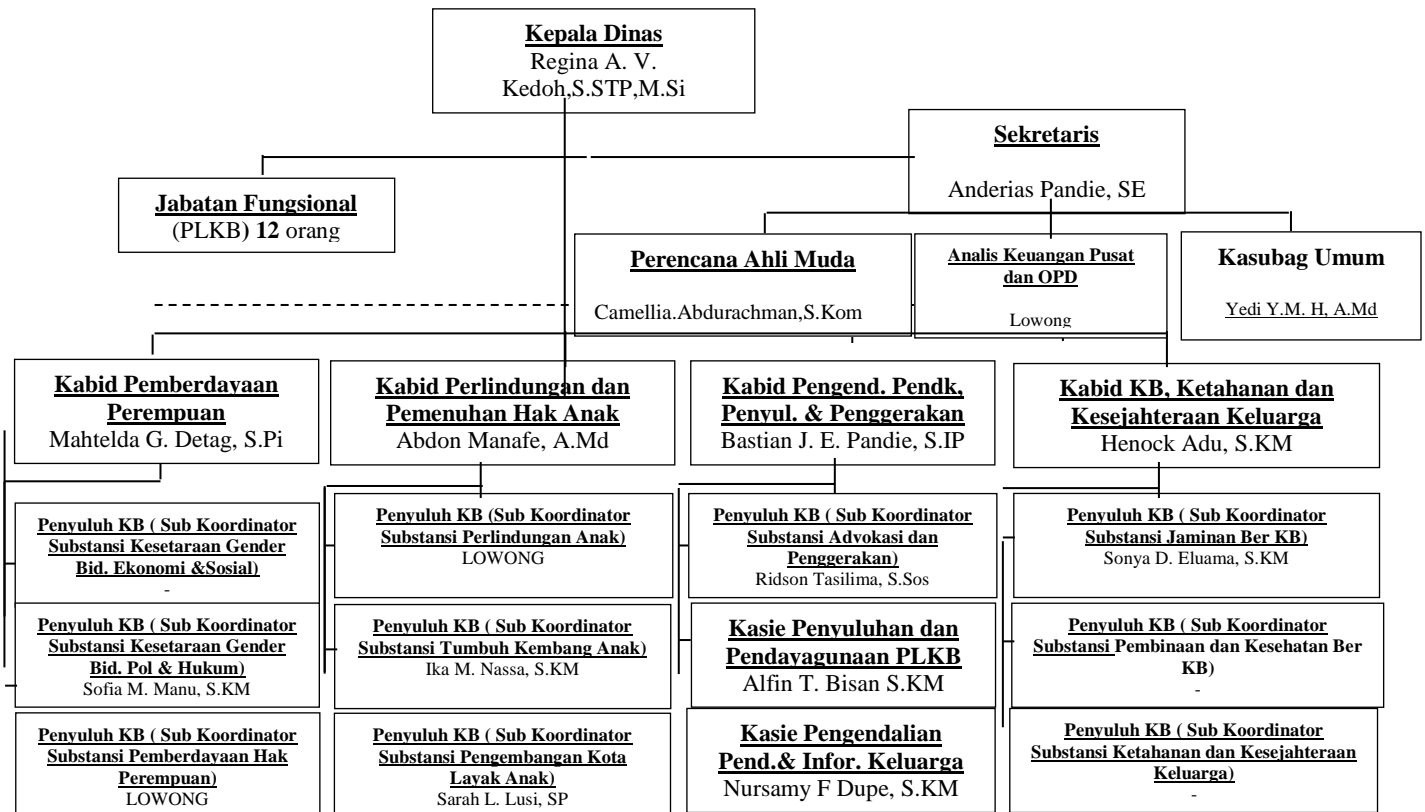
a. Susunan Organisasi.

Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

1. Kepala Dinas (terisi);
2. Sekretaris (terisi);
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (terisi);
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (terisi);
5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan (terisi);
6. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (terisi)
7. Pejabat Struktural Es IV.a sejumlah 1 (satu) orang.
8. Pelaksana Jabatan Fungsional (JF) sejumlah 10 (sepuluh) orang
9. Pelaksana Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 4 (empat) orang.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Rote Ndao



Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

4. Sumber Daya Manusia.

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 28 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang laki-laki dan 13 (tiga belas) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk. I	-	1	1
2	IV/a	Pembina	1	2	3
<i>Jumlah Golongan IV</i>			<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3	III/d	Penata Tk. I	5	5	10
4	III/c	Penata	0	3	3
5	III/a	Penata Muda	3	2	5
<i>Jumlah Golongan III</i>			<i>7</i>	<i>9</i>	<i>16</i>
6	II/d	Pengatur Tk.I	1	1	1
7	II/c	Pengatur	0	0	1
<i>Jumlah Golongan II</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
TOTAL			11	14	25

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao sebanyak 28 (dua puluh lima) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 21 (sembilan belas) orang dan golongan II sebanyak 3 (dua) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	-	1	1
2	S1	8	11	19
3	D3	0	4	4
4	SLTA/SMK	4	2	6
Total		11	14	28

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 1 (satu) orang, S1 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dan SMA berjumlah 6 (enam) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Regina A.V. Kedoh S.STP. M.Si NIP.198008271999122003	Pembina Tk. I/ IV.b	Kepala Dinas
2.	Anderias Pandie, SE NIP.197404042010011016	Pembina/IV.a	Sekretaris
3.	Abdon Manafe, A.Md NIP .	Penata Tk.I /III-d	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
4.	Bhastian J. E. Pandie, S.IP NIP.	Penata Tk.I /III-d	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
5.	Mahtelda G. Detaq, S.Pi NIP. 197801022003122012	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
6.	Henock Adu, S.KM NIP. 197902011999031002	Penata Tk.I /III-d	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7.	Yedi.Y.M Heli, A.Md NIP.196507271989032013	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Pemberdayaan Hak Perempuan)
8.	Ridson Tasilima,S.Sos NIP .197508182006041003	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Advokasi dan Pergerakan)
9.	Sofia A. Manu, S.KM NIP .198110112009042007	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum)
10	Sonya D. Eluama, S.KM . NIP .198110222009042009	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Jaminan Ber-KB)

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
11 .	Alfin T. Bisan, S.KM NIP. 197904062000122002	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga)
12 .	Camellia Abdurachman, S.Kom NIP. 198107092006042026	Penata Tk.I /III-d	Perencana Ahli Muda
13 .	Sarah L. Lusi, SP NIP. 197303042005012009	Penata /III-c	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kota Layak Anak)
14 .	Nursamy F. Dupe, S.KM NIP 198902042011012004	Penata /III-c	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB)
15 .	Ike M. Nassa, S.KM NIP. 198808202011012012	Penata /III-c	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Tumbuh Kembang Anak)
16 .	Emri I.M Dethan NIP .197504142003121004	Penata Muda / III-a	Pelaksana
17 .	Melky A.F. Thutaes NIP .197905312003121005	Penata Muda / III-a	Pelaksana
18 .	Yeni Suryani, A.Md NIP .1978090220122002	Pengatur Tk.I/II-d	Pelaksana
19 .	Petrus Bolla NIP .197912112007011008	Pengatur /II-c	Pelaksana
20 .	Amin Imanuel Faot, S.Sos NIP .199212252022031003	Penata Muda / III-a	Pelaksana
21 .	Teressa Kebewa Makin, S.Pi NIP .199709112022032003	Penata Muda / III-a	Pelaksana
22 .	Beni Pello NIP. 19760506		
23 .	Joel Timu NIP.		
24 .	Leksi A. Sueb NIP	Penata Muda / III-a	Pelaksana
25 .	Seny A. Luik, SP	Penata Muda / III-a	Pelaksana
26 .	Nindy Haning, S.Km	Penata Muda / III-a	Pelaksana
27 .	Sumyanti Moy, A.Md,P	Pengatur Tk.I/II-d	Pelaksana

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu Sopir, security dan Tenaga Penyuluh Lapangan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

5. Sarana Prasarana.

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 116 (seratus enam belas) unit yang terdiri dari 6 (enam) unit kendaraan roda empat dan 109 (seratus sembilan) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 7 unit diantaranya Toyota Avanza 1300 Nomor Polisi DH 36 YU untuk kendaraan operasional kepala Dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Mitsubishi Strada CR 28L DOBLE CABIN Nomor Polisi DH 152 YU (rusak berat), Mobil DAIHATSU/ LUXIO 1.5 X M/T 18402RG-7MX Nomor Polisi DH 231 YU dibawah tanggungjawab Kepala Bidang P2HA, ISUZU TFS6YD-MAX DC 2,5L 4x4 M/T Nomor Polisi 101 VB (Mupen), ISUZU TBR54 PICK UP TURBO Nomor Polisi 9101 VB (Mobil Alokon), ISUZU MKR 5500E2HWP Nomor Polisi 7002 VB (mobil antar jemput peserta aseptor).
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari :
109 (seratus sembilan) unit yang dimana dipegang oleh ASN DP3AP2KB dan juga PKB dan PLKB.

Tabel 1.4.
Keadaan Kendaraan Bermotor

No.	Merk/Tipe	No. Polisi	Jumlah	Keterangan
1.	Toyota / Avansa	DH 36 YU	1 unit	Baik
2.	Mitsubishi Strada CR 28L DOBLE CABIN	DH 152 YU	1 unit	Rusak Berat
3.	DAIHATSU/ LUXIO 1.5 X M/T 18402RG-7MX	DH 231 YU	1 unit	Mobil Molin
4	IZUSU TFS6YD-MAX DC 2,5L 4x4 M/T	DH 101 VB	1 unit	Mobil Mupen
5	ISUZU TBR54 PICK UP TURBO	DH 9101 VB	1 unit	Mobil Alokon
6	ISUZU MKR 5500E2HWP	DH 7002 YU	1 unit	Mobil Antar Jemput Peserta Asepstor
7	Hino WU302R-HKMLHD3/110SD	DH 7501 YU	1 Unit	Bis Operasi (Rusak)
8	Honda Win 100 MCB 97 CC	DH 5725 YU	1 unit	Rusak Berat
9.	Honda Supra Fit NF 100 SLI	DH 5071 YU	1 unit	Rusak Berat
10.	Honda Revo NF 100 TD	DH 5255 YU, DH 5256 YU, DH 5254 YU	3 unit	Rusak Berat
11.	Honda Revo NF 100 TD	DH 5329 YU, DH 5330 YU, DH 5332 YU, DH 5333 YU, DH 5334 YU, DH 5335 YU, DH 5336 YU, DH 5337 YU, DH 5338 YU, DH 5339 YU, DH 5341 YU	12 unit	Rusak Berat
12.	Yamaha 157 Jupiter MX	DH 5389 YU, DH 5390 YU	2 unit	Rusak Berat
13.	Honda Revo Absolut NF11B1D M/T	DH 5550 YU, DH 5560 YU, DH 5561 YU, 5562 YU, 5563 YU, DH 5564 YU, DH 5565 YU, DH 5566 YU, DH 5567 YU, DH 5568 YU, DH 5569 YU, DH 5570 YU, DH 5571 YU, DH 5572 YU, DH 5573 YU, DH 5574 YU, DH 5575 YU, DH 5576 YU, DH 5577 YU, DH 5578 YU, DH 5579 YU, DH	37 unit	Rusak Berat DH 5565 YU, DH 5568 YU, DH 5569 YU, DH 5576 YU, DH 5580 YU, DH 5583 YU, DH 5586 YU, DH 5588 YU, DH 5595 YU, Kondisi Rusak Ringan DH 5585 YU, DH 5570 YU, DH 5561 YU Kondisi Baik

No.	Merk/Tipe	No. Polisi	Jumlah	Keterangan
		5580 YU, DH 5581 YU, DH 5582 YU, DH 5583 YU, DH 5584 YU, DH 5585 YU, DH 5586 YU, DH 5587 YU, DH 5588 YU, DH 5589 YU, DH 5590 YU, DH 5591 YU, DH 5593 YU, DH 5594 YU, DH 5595 YU		
14.	Honda Revo Absolute NF11B1D	DH 5666 YU, 5667 YU, DH 5668 YU	3 Unit	Rusak Ringan
15.	Honda Revo	DH 5757 YU, DH 5758 YU, DH 5759	3 Unit	Rusak Ringan
16.	Honda / AFX12U21C08 M/T	DH 6059 YU, DH 6060 YU, DH 6061 YU, DH 6062 YU, DH 6063 YU, DH 6064 YU, DH 6065 YU, DH 6066 YU, DH 6067 YU, DH 6068 YU	10 Unit	Baik
17.	Yamaha 2 PV	DH 2004 VB, DH 2005 VB, DH 2006 VB, DH 2007 VB, DH 2008 VB, DH 2009 VB, DH 2010 VB, DH 2011 VB, DH 2012 VB, DH 2013 VB, DH 2014 VB, DH 2015 VB, DH 2016 VB, DH 2017 VB, 2018 VB, DH 2019 VB, DH 2020 VB, DH 2021 VB, DH 2022 VB, DH 2023 VB	20	Baik
18.	Honda E1F02N12M2A/T	DH 2044 VB, DH 2045 VB	2 Unit	Baik
19.	Honda A1F02N06M1 A/T	DH 2017 WT, DH 2018 WT, DH 2019 WT,	15 Unit	Baik

No.	Merk/Tipe	No. Polisi	Jumlah	Keterangan
		DH 2020 WT, DH 2021 WT, DH 2022 WT, DH 2023 WT, DH 2024 WT, DH 2025 WT, DH 2026 WT, DH 2027 WT, DH 2028 WT, DH 2028 WT, DH 2029 WT, DH 2032 WT, DH 2033 WT, DH 2034 WT		

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tabel 1.5.
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah	Ket
1	Meja ½ Biro		53 unit	
2	Meja PAUD		10 unit	
3	Kursi Kayu		7 unit	
4	Set Kursi Sitje		10 unit	
5	Kursi Roda		11 unit	
6	Kursi PAUD		50 unit	
7	Lemari 2 pintu	2 pintu	38 unit	
8	Komputer HP		1 unit	
9	Komputer PC LG		10 unit	
10	Laptop PC Aser	-	3 unit	
11	Laptop	Compaq	5 unit	
12	Laptop	Acer	1 unit	
13	Notebook	Acer	1 unit	
14	Laptop dan Acecoris	Asus	5 unit	
15	Stavolt	Matsugawa	5 unit	
16	Printer	Canon Pixma IP 258	5 unit	
17	Set IUD KIT	-	9 unit	
18	Set IMPLANT KIT	-	11 unit	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah	Ket
19	Set BKB KIT	-	57 unit	
20	Set Buku Kepustakaan/KIE KIT	-	54 unit	
21	Paket Alat Peraga/BKL KIT		20 unit	
22	UPS/Stabiliser		9 unit	
23	Flashdisk MP-4		1 unit	
24	Mesin Jahit Butter Fly		16 unit	
25	Dispenser		2 buah	
26	Fiber Air		4 unit	
27	Karpet		1 unit	
28	AC		10 unit	
29	Kipas Angin		34 unit	
30	Papan Nama Kantor		3 unit	
31	Printer		21 unit	
32	Kursi Lipat Vernekel		66 unit	
33	Jam Dinding/Meja		4 unit	
34	Rol Taplak Meja		1 Roll	
35	Handycam		2 buah	
36	Pengeras Suara/Warles (Public Addres)		30 unit	
37	Set Sarana PLKB		34 set	
38	Obgyn Bad		10 unit	
39	Kursi Rapat Plastik		50 buah	
40	Keyboard PC		1 buah	
41	Vacum Cleaner		2 buah	
42	Speaker Komputer		2 set	
43	Catridge Printer		2 buah	
44	Mouse Komputer		6 buah	
45	Modem Flash		1 buah	
46	Buah Whiteboard		21 buah	
47	Rak Arsip		14 unit	
48	Penghisap Asap (Exhaufund)		33 unit	
49	Trolly Pengangkut		1 buah	
50	Tabung Pemadam		2 buah	
51	Tangga Aluminium		1 buah	
52	Unit Pallet		2 buah	
53	Instalasi Telepon dan Fax		2 paket	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah	Ket
54	GenRe KIT		7 paket	
55	Laptop Lenovo		20 unit	
56	Lemari Penyimpan Alkon		15 buah	
57	Parabola		1 unit	
58	Televisi		3 unit	
59	Meja Kerja Pejabat		2 buah	
60	Buku ABPK		10 buah	
61	Sofa		3 set	
62	Gorden		86 buah	
63	Instalasi Air Bersih		2 paket	
64	Pesawat Telepon		2 buah	
65	Faxsimile		2 buah	
66	Dinding Sekat		2 buah	
67	Brankas		1 buah	
68	Kasur Lantai		30 buah	

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

D. Dasar Hukum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan :

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AP2KB Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah.
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;

E. Sistematika Pelaporan.

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

A. Latar Belakang.

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

B. Maksud Dan Tujuan.

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

C. Gambaran Umum. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

E. Sistematika Laporan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao

B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan
Formula Pengukurannya.

C. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan
targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun
Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja.

Menyajikan metode Kerangka pengukuran kinerja
dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan
cara membandingkan antara target (rencana) dengan
realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan
analisis capaian kinerja.

B. Capaian Kinerja.

Menyajikan metode dan hasil pengukuran kinerja
masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi
yaitu dengan perbandingan target dan realisasi,
perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahun
akhir RENSTRA.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Menyajikan metode Evaluasi dan analisis capaian kinerja
Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan
aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara
umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja
pada bagian sebelumnya.

D. Realisasi Anggaran

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran
Tahun 2024 beserta rincian belanja per-program.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari LKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun system akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

RENSTRA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi :

a. Visi.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”**.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

• **BERTUMBUH :**

- Maju : meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

• **MAKMUR / SEJAHTERA :**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
 - Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.
- **TAAT :**
 - Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
 - Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.
 - **BERSAHABAT :**
 - Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
 - Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-1 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing”**, sebagai upaya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan Anak serta Suksesnya, sehingga menghasilkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rote Ndao yang berkualitas sesuai Program Keluarga Berencana Menuju Masyarakat Rote Ndao yang Bermartabat dan Sejahtera.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao adalah :

“Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, Perlindungan Anak serta Suksesnya Program Keluarga Berencana menuju masyarakat Rote Ndao yang Bermartabat dan Sejahtera”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yakni :

“Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, Perlindungan Anak serta Suksesnya Program Keluarga Berencana menuju masyarakat Rote Ndao yang Bermartabat dan Sejahtera”.

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao antara lain :

- a. Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*);
- b. Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. Pengembangan kinerja organisasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
- d. Pelaksanaan dan pengelolaan analisis jabatan serta analisis beban kerja pada semua Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

3. Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Kegiatan dari program ini meliputi :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penguatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Kegiatan dari program ini meliputi :
 - 1) Pelembagaan Penguatan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota;
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 4) Lomba HUT Darma Wanita;
 - 5) Fasilitas Organisasi DWP;
- c. Program Perlindungan Perempuan
 - 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota;
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 1) Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
 - 2) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
- e. Program Pemenuhan Hak Anak
 - 1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;

- f. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kota;
- g. Program Pengendalian Penduduk
 - 1) Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
 - 3) Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota;
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - 2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - 3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota;
 - 4) Pemberdayaan dan peran serta peningkatan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber – KB;
- i. Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahter (KS)
 - 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - 2) Fasilitasi Kota Layak Anak
 - 3) Fasilitasi Forum Anak
 - 4) Rapat Koordinasi, Perlindungan Anak
 - 5) Pembentukan dan Fasilitasi Forum Anak Tk. Kec dan Desa
 - 6) Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak

B. Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Presentase Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	Orang	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah / Jumlah Pekerja Perempuan X 100
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	Indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dibentuk dalam 3 dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Total fertility rate (TFR)	Persen	Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun
3	Meningkatnya kualitas Dan aksesibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Persen	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB / Jumlah semua perangkat daerah x 100
		Rasio Aseptor KB	Persen	Jumlah Akseptor KB / Jumlah pasangan usia subur x 100

		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	Persen	Jumlah peserta KB aktif / Jumlah pasangan usia subur x 100
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	Persen	Jumlah Kelahiran dari Perempuan pada kelompok umur 15-19 / Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama X 100
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah pasangan usia subur x 100
4	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga	Persen	Jumlah Kekerasan dalam rumah tangga / Jumlah rumah tangga X 100

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2024 mengalami perubahan pada tanggal 14 Februari 2024 disebabkan oleh Penyesuaian Program/Kegiatan sesuai Juknis DAK BOKB TA 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 untuk mencapai 3 (tiga) tujuan, 4 (empat) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8
Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,53	85,28	91,18	Sangat Tinggi
		Capaian Kinerja Tujuan 1				91,18	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Presentase Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	Orang	4,70	7,9	168	Sangat Tinggi
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	49,53	49,07	99	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				133,58	Sangat Tinggi

Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,50	1,58	-102	Sangat Rendah
		Capaian Kinerja Tujuan 2				-102	Sangat Rendah
	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Total fertility rate (TFR)	%	3,40	3,11	108,53	Sangat Tinggi
		Capaian Kinerja Sasaran 2				108,53	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas Dan aksesibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Rasio akseptor KB	%	58,00	50,32	87	Tinggi
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	57,0	50,32	88	Tinggi
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	10	20,30	-83	Sangat Rendah
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,30	20,04	-258	Sangat Rendah
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				-13,15	Sangat Rendah

Meningkatkan Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak;		Presentase Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Orang	0,06	0,11	69,69	Sedang
		Capaian Kinerja Tujuan 3				69,69	Sedang
	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	97,00	100	103	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4				103	Sangat Tinggi
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					302,22	Sangat Tinggi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian sasaran sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja \geq Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Tidak Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran program pendukung capaian kinerja, jika persentase efisiensi anggaran diatas 0% maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sama dengan 0% maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui perbandingan persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai kesenjangan >1 maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai kesenjangan <1 sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

B. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TUJUAN

Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja tujuan sebagaimana tertera pada tabel berikut :

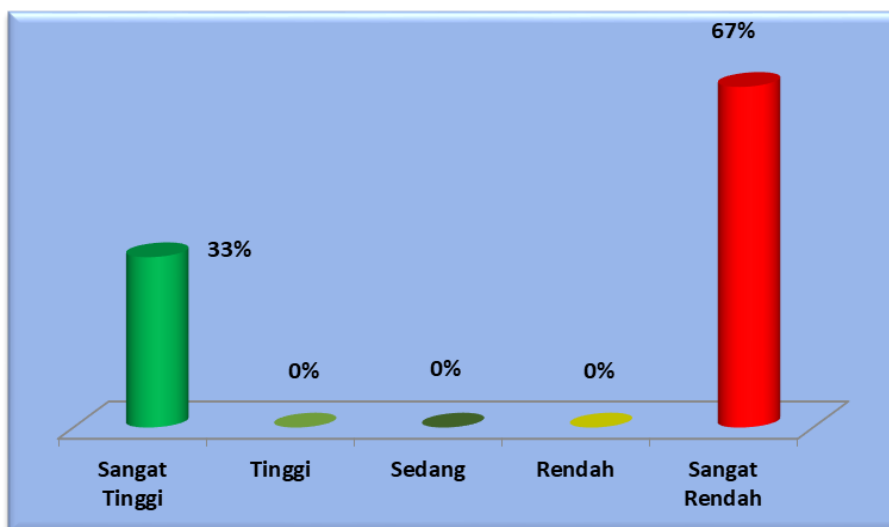
Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,53	85,28	91,18	Sangat Tinggi
	Capaian Kinerja Tujuan 1				91,18	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,50	1,58	-102	Sangat Rendah
	Capaian Kinerja Tujuan 2				-102	Sangat Rendah
Meningkatkan Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak;	Presentase Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Orang	0,06	0,11	-83,22	Sangat Rendah
	Capaian Kinerja Tujuan 3				-83,22	Sangat Rendah
					-31,46	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 3 (Tiga) tujuan dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar -31,46% atau dikategorikan **“Sangat Rendah”**, dengan capaian kinerja tujuan **“Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan”** sebesar 91,18% (*Sangat Tinggi*), capaian kinerja tujuan **“Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk”** sebesar -102% (*Sangat Rendah*), capaian kinerja tujuan

“Meningkatkan Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak;” sebesar -83,22% (*Sangat Rendah*).

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024



Sumber : Data Olahan, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa :

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 1 (satu) indikator atau 33%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 33%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 2 (dua) indikator atau 33%.

2. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN

Pengukuran capaian perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :

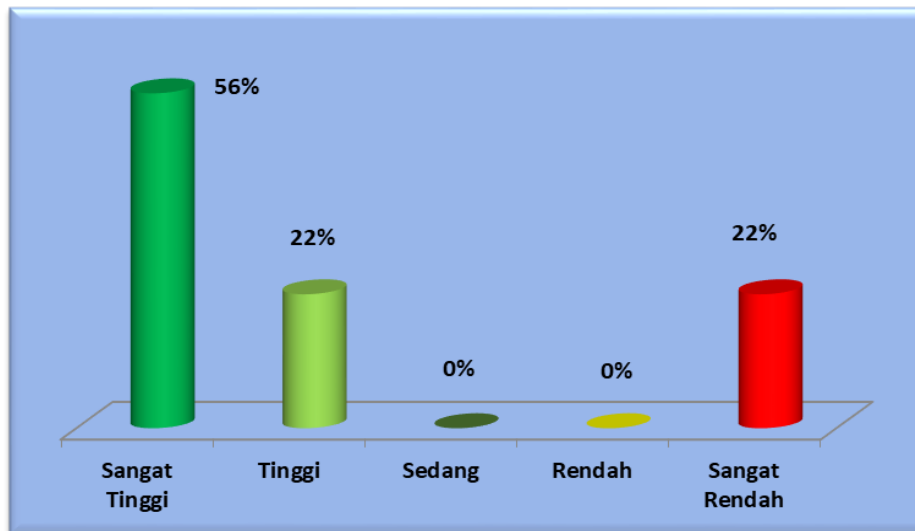
Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Presentase Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	Orang	4,7	7,9	168	Sangat Tinggi
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	49,53	49,07	99	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				133,58	Sangat Tinggi
Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Total fertility rate (TFR)	%	3,40	3,11	91,47	Sangat Tinggi
	Capaian Kinerja Sasaran 2				91,47	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas Dan aksesibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rasio akseptor KB	%	58,00	50,32	87	Tinggi

	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	57,0	50,32	88	Tinggi
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	10,00	20,30	-83	Sangat Rendah
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,30	20,04	-258	Sangat Rendah
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				-13,15	Sangat Rendah
Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	97,00	100	103	Sangat Tinggi
	Capaian Kinerja Sasaran 4				103	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					78,75	Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **99,00%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak** sebesar **133,58%** (*Sangat Tinggi*), capaian kinerja Sasaran **Terwujudnya Pengendalian Penduduk** sebesar **91,47%** (*Sangat Tinggi*), rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya kualitas Dan akseibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran -13,15%** (*Sangat Rendah*) dan capaian kinerja Sasaran **Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak 103%** (*Sangat Tinggi*).

Gambar 3.2.
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024



Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 5 (lima) indikator atau 56%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 2 indikator atau 22%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 2 indikator atau 22%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN 1

Mewujudkan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

Kesenjangan Gender dalam Pembangunan merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan.

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Mewujudkan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	49,01	93,53	85,28	91,18	85,00	174	100,33
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						91,18	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Mewujudkan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Indeks Pembangunan Gender**

(IPG). Penjelasan atas capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indikator Indeks Pembangunan Gender ada 3 (Tiga) komponen utama yaitu Kesehatan (Angka Harap Hidup), Pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan Ekonomi. Adapun gambaran 3 (tiga) Komponen dimaksud yaitu:

- a. Kesehatan (Angka Harapan Hidup) yaitu salah satu elemen utama yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah usia panjang dan sehat (a long and healthy life). Indikator ini mengacu pada Angka Harapan Hidup (AHH) pada penduduk yang dihitung sejak kelahirannya. berdasarkan jenis kelamin, AHH perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berarti bahwa perempuan lebih memiliki harapan berumur panjang dibandingkan laki-laki. Lebih lamanya harapan hidup pada perempuan dipengaruhi oleh banyak 42 faktor. Selain faktor sosial yang menggambarkan perilaku hidup perempuan dinilai lebih sehat dibandingkan laki-laki, komponen lain yang turut mempengaruhi usia perempuan lebih lama dari laki-laki adalah faktor genetik atau female advantages (FA). Merujuk pada usia harapan hidup yang cenderung lebih lama pada perempuan dan laki-laki, maka kebijakan dan program pembangunan harus mempersiapkan fasilitas yang memadai pada kelompok lanjut usia (lansia) yang dapat diprediksi meningkat. Fasilitas bagi kaum lansia tidak hanya pada kesiapan sarana prasarana, namun program dan kebijakan yang berorientasi pada kemandirian lansia menjalani masa tuanya melalui kegiatan positif.
- b. Pendidikan yaitu Pembangunan manusia tidak bisa dilepas dari proses pendidikan. Tanpa pendidikan, pembangunan manusia hampir tidak mungkin terjadi. Dalam mengukur hasil pembangunan manusia, elemen pendidikan dilihat berdasarkan dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata Rata Lama Sekolah (RLS).Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur peluang penduduk di suatu daerah dapat menikmati pendidikan berdasarkan rasio penduduk yang bersekolah di usia yang sama saat itu. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal. Mengetahui HLS penduduk menginformasikan gambaran capaian pembangunan di bidang pendidikan yang dapat dinikmati atau dicapai setiap anak di daerah tertentu. Semakin tinggi peluang sekolah pada anak, maka pembangunan di bidang pendidikan semakin menunjukkan keberhasilannya. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Angka ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan dalam jangka panjang. Mengetahui angka RLS dilakukan dengan menghitung jumlah tahun yang sudah ditempuh

penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam mengukur RLS dimulai pada penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi di usia ini proses pendidikan formal sudah selesai dilalui.

- c. Ekonomi yaitu Selain melihat aspek pendidikan dan kesehatan, indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender, indikator ini di hitung dari pengeluaran per kapita pada perempuan dan laki-laki ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pengeluaran per kapita pada perempuan ini, salah satu faktor utama kesenjangan ekonomi ini dapat dilihat dari perbedaan upah yang diterima. Secara umum, rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah 43 bila dibandingkan dengan laki-laki baik dilihat berdasarkan tempat tinggal, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama dan status perkawinan.

Tabel 3.4.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Rote Ndao

IPG	
2021	84.64%
2022	84.08%
2023	49.01%
2024	85.28%

Sumber : BPS Kabupaten Rote Ndao, 2024

Berdasarkan tabel diatas maka untuk mendapatkan hasil IPG menghitung capaian Indeks Pembangunan Gender sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Data Capaian IPM Perempuan dan IPM Laki Tahun 2024

No	IPM	Jumlah
1	Laki – laki	69,18
2	Perempuan	85,28

Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Tahun 2024

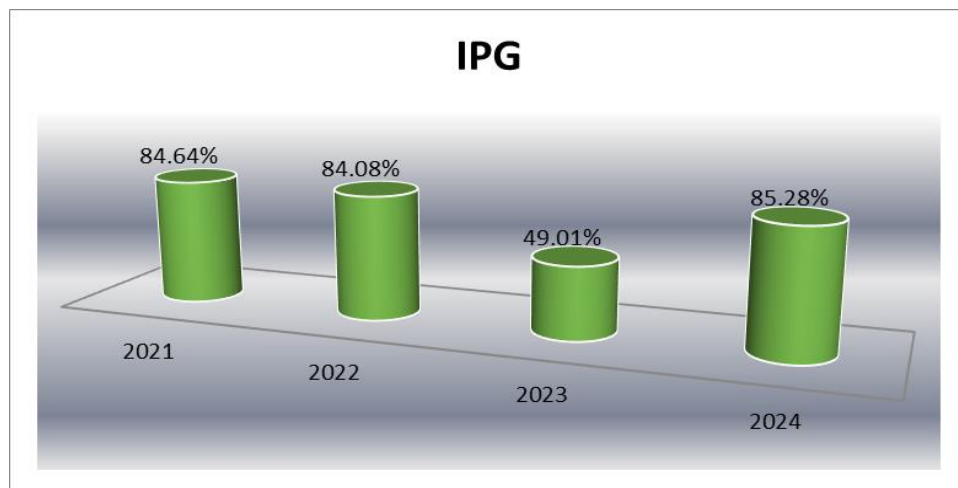
Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Gender ditargetkan sebesar

93,53 dan terealisasi sebesar 85,28 dengan capaian kinerja sebesar 91,18%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 sebesar 85,28 jika di bandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 49,01 menunjukkan bahwa capaian Tahun 2024 Melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 36,27 dan capaian kinerja sebesar 174.

Gambar 3.3
Trend Persandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Rote Ndao



Sumber : File Olahan 2024

Tren realisasi Indeks Pembangunan Gender IPG selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni tahun 2021 (84,64%), tahun 2022 (84,08%), dan mengalami penerunan kinerja tahun 2023 sebesar (49,01%), dan mengalami peningkatan kinerja tahun 2024 sebesar (85.28%).

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2024 sebesar 85.28% jika di bandingkan dengan target kinerja tahun 2024 sebagai tahun akhir RENSTRA (2019-2024) sebesar 85,00 % maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA (2019-2024) dengan capaian kinerja sebesar 100,33

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/ Peningkatan)

1. Semua Pembangunan gender mempunyai faktor pendukung yang meliputi pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang meliputi gender laki-laki dan perempuan yang melibatkan lintas SKPD sehingga pengukuran dan perhitungan terkait dengan BPS.
2. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan disegala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga
4. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Budaya Patriarki sehingga masyarakat belum sepenuhnya percaya perempuan mampu berprestasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen/DPRD; dan
2. Perempuan yang belum percaya diri/kurang persiapan ikut bersaing saat pemilihan DPRD.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan sasaran ini ke depan, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pelatihan perempuan yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD latihan lebih sistematis dan terorganisir dengan baik; dan
- 2) Sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan di bidang Politik.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Tidak tersedia Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator kinerja tujuan tersebut.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja Tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan Mewujudkan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
91,18	-	100	Efisien	0,0	Kurang Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja tujuan **Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan** mencapai tingkat efisiensi sebesar 100% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 0,0 sehingga dikategorikan Kurang Efektif.

TUJUAN 2
Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk

Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Tabel 3.7.
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian
 Jumlah Penduduk**

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,65	1,50	1,58	-102	1,50	104	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						-102	Sangat Rendah		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk. Penjelasan atas capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Rote Ndao adalah Jumlah Penduduk pada Tahun pertama dibandingkan Jumlah Penduduk pada tahun dasar dan selisih tahun Jumlah penduduk dibandingkan dengan Jumlah Penduduk pada tahun dasar. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah pencapaian penduduk yang berpartisipasi dalam pelayanan ber – KB oleh Pasangan Usia Subur (PUS) dengan cara memiliki anak tidak lebih dari 2 (dua) orang dengan adanya program keikutsertaan ber – KB ini maka akan membantu menekan laju pertumbuhan penduduk.

Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk belum melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Laju Pertumbuhan Penduduk ditargetkan sebesar 1,50 dan terealisasi sebesar 1,58 dengan capaian kinerja sebesar - 102%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 sebesar 1,58 jika di bandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (Tahun 2023), sebesar

1,65 maka menunjukkan capaian Tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja Tahun sebelumnya yaitu dengan penurunan kinerja sebesar -0,07% dan capaian kinerja sebesar 104%.

Realisasi bagi

Gambar 3.4.
Tren Data Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Tahun 2021-2024



Sumber : File Olahan 2024

Tren realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,58% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 1,50%, maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 sebesar 105 %

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/ Peningkatan)

pencapaian kinerja sasaran ini sangat di pengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Semua perangkat daerah berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kampung KB
2. Adanya dukungan dana yang memadai dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan di kampung KB.
4. Jumlah Anak harus 1 sampai 2 Anak

5. Pasangan Usia Subur yang berumur < 35 tahun
6. Pengerakan konseling bagi PUS 54
7. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
8. Menekan Angka kelahiran
9. Pencegahan Stunting, Gizi Buruk
10. Adanya KIE Lewat media
11. Peran Tenaga Bidan

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

- Rendahnya keikutsertaan ber KB pada PUS
- PUS yang mengikuti KB sudah mempunyai anak lebih dari dua (2) orang serta adat istiadat yang mempengaruhi sehingga banyak keluarga/PUS yang memiliki anak lebih dari 2 orang
- Minimnya Pengetahuan Pasangan Usia Subur yang masih rendah
- Tenaga Penyuluh Lapangan masih sangat kurang
- Masih ada sebagian PUS yang menganggap KB adalah hal yang tabuh
- Efek samping dari ber – KB (haid tidak teratur, BB meningkat)

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan sasaran ini ke depan, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendewasaan usia perkawinan (21 tahun – 25 tahun)
- Jaga jarak kelahiran
- Meningkatkan konseling terhadap pasangan usia subur
- Perlu adanya ditambahkan Penyuluh Lapangan sesuai jumlah desa
- Meningkatkan pembinaan pada peserta KB aktif
- Meningkatkan konseling KB bagi PUS
- Pembinaan Poktan
- Lebih meningkatkan konseling bagi PUS tentang manfaat dan efek samping
- Meningkatkan pelayanan yang lebih Optimal

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian tujuan ini yaitu Program Pengendalian Penduduk dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 289.399.900,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 244.989.800,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 84,65%

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja Tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
-102,33	84,65	15,35	Efisien	1,21	Kurang Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja tujuan Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk mencapai tingkat efisiensi sebesar 15,35% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **Kurang Efektif**.

TUJUAN 3
Meningkatkan Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-Undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari Negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, telah dilakukan upaya dan tindak lanjut atas perlindungan perempuan dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini.

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya perlindungan
terhadap perempuan dan anak
serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1	Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	41	0,06	0,11	-83,22	0,05	-83	-99,89
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						-83,22	Sangat Rendah		

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja tujuan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penjelasan atas capaian indikator kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut :

Indikator Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Indikator Persentase Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Jumlah KDRT dibandingkan Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Rote Ndao. Jumlah KDRT pada Tahun 2024 sebanyak 123 Kasus dari jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 42.820.

Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam 91 rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Tabel 3.10.
Cakupan Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) 2024

NO	KECAMATAN	KDRT	
		L	P
1	LOBALAIN	0	11
2	ROTE BARAT DAYA	0	5
3	ROTE BARAT LAUT	0	4
4	NDAO NUSE	0	0
5	ROTE SELATAN	0	2
6	LANDULEKO	0	0
7	ROTE BARAT	0	4
8	ROTE TIMUR	0	3
9	ROTE TENGAH	0	5
10	PANTAI BARU	0	5
11	LOAHOLU	0	4

	TOTAL	1	43
--	-------	---	----

Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Rote Ndao : 36.346

Sumber : DP3AP2KB 2024

Berdasarkan tabel diatas maka untuk mendapatkan capaian Rasio KDRT sebagai berikut :

Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2024

$$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$$

$$\frac{43}{36.346} \times 100 = 0,11\%$$

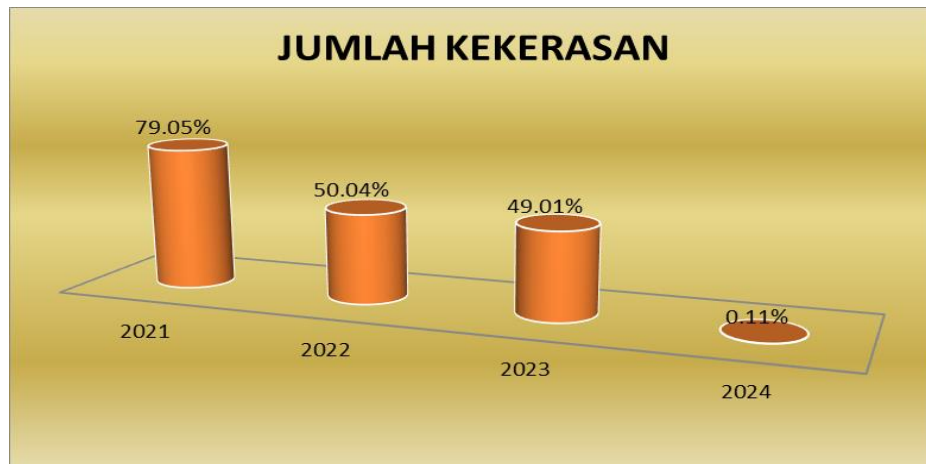
Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditargetkan sebesar 0,06 dan terealisasi sebesar 0,11 dengan capaian kinerja sebesar -83,22%

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2024 sebesar 0,11 jika dibandingkan dengan capaian kinerja (tahun 2023) sebesar 41 menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui realisasi tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar -40,89 dan capain kinerja sebesar -83 dari Tahun sebelumnya.

Gambar 3.5.
Tren Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Tahun 2021-2024



Sumber : File Olahan 2024

Trend Realisasi Indikator Kinerja Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja yaitu tahun 2021 sebesar (79,05%), tahun 2022 (50,04)%, (49,01%), tahun 2023 (49,01%) dan tahun 2024 (0,11%)

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi Indikator Presentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2024 sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 0,05 menunjukkan bahwa target akhir tahun RENSTRA belum tercapai sebesar 99,89%

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat di pengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran dan Perubahan pola pikir masyarakat untuk mencari bantuan dan melaporkan kekerasan yang dialami.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menolong korban kekerasan.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Kurangnya konselor terlatih, pendamping hukum dan para legal

2. Jumlah tenaga pendamping pada pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak sangat sedikit dan berfokus di kabupaten.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan sasaran ini ke depan, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelatihan tenaga konselor, para legal dan pendamping hukum dalam penanganan kasus
2. Menjalinkan kemitraan dengan LBH di Kab. Rote Ndao
3. Pembentukan satuan tugas di desa dan kecamatan untuk menjangkau korban yang jauh dari pusat pelayanan pendampingan korban.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Perlindungan Perempuan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.305.000.000,- (*tiga ratus lima juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 352.763.675 (*tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau sebesar 82,87%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja Tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta
pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
-83,22	82,87	17,13	Efisien	0,99	Kurang Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak** mencapai tingkat efisiensi sebesar 17,33% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **Kurang Efektif**.

SASARAN 1
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan.

Tabel 3.12.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2025	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2025
				Target	Realisasi	% Capaian			
1	Presentase Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	Orang	4,2	4,70	7,9	168	4,7	188	168,09
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	49,01	49,53	49,07	99	51,20	100	95,84
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						133,58	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak** terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu Presentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Penjelasan atas capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah di bagi dengan Jumlah Pekerja Perempuan di kalikan dengan seratus persen.

Tabel 3.13.
Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG)	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,0 %	$\frac{1536}{37340} \times 100 = 4,11$	4,50%	$\frac{1536}{39580} \times 100 = 3,9$	4,7%	$\frac{1595}{40472} \times 100 = 4,2$	4,70%	$\frac{2458}{31013} \times 100 = 7,9$

Sumber Data : DP3AP2KB 2024

Analisis perbandingan kinerja dengan target tahun 2024

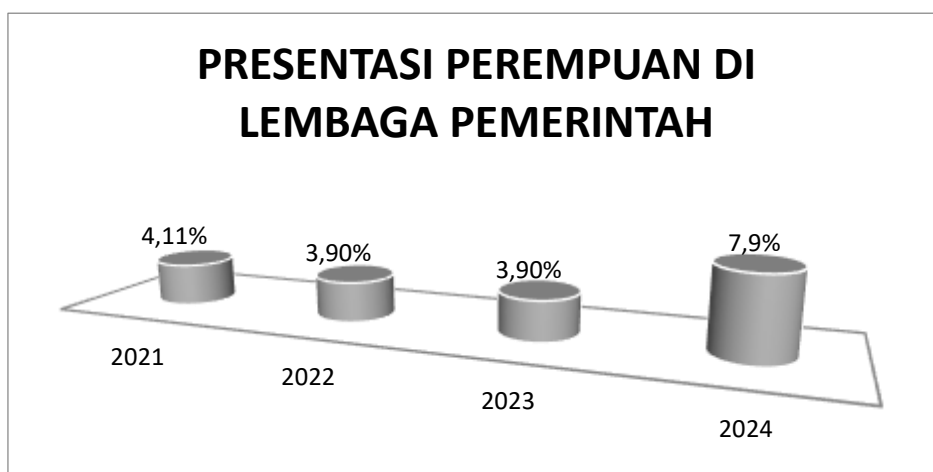
Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Partisipasi angkatan kerja perempuan dilembaga pemerintah belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Partisipasi angkatan kerja perempuan ditargetkan sebesar 4,70 dan terealisasi sebesar 7,9 dengan capaian kinerja sebesar 168%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

Capaian Kinerja Partisipasi angkatan kerja perempuan dilembaga pemerintah Tahun 2024 sebesar 7,9 jika dibandingkan dengan capaian kinerja (tahun 2023) sebesar 4,2 menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 3,7 dan capaian kinerja sebesar 168

Gambar 3.6.

Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2021-2024



Sumber : DP3AP2KB 2024

Tren realisasi Partisipasi angkatan kerja perempuan dilembaga pemerintah selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif pada tahun 2023 hingga tahun 2024.

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi Indikator Partisipasi angkatan kerja perempuan dilembaga pemerintah Tahun 2024 sebesar 7,9 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 4,7 maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan capaian kinerja sebesar 168,09.

2. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender mencakup didalamnya adalah jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun Indeks Pembangunan Gender yang adalah komposit dari 3 (Tiga) komponen yaitu Pengambilan Keputusan Politik, tingkat pendapatan dan peranan dalam kehidupan sosial. Adapun gambaran 3 (tiga) komponen dimaksud adalah :

- a. Pengambilan Keputusan Politik yaitu aspirasi perempuan dapat terwakili dalam menyusun dan membentuk kebijakan perundang – undangan yang berkeadilan Gender, keterwakilan perempuan di politik berdampak pada akses peluang kesempatan partisipasi perlindungan dan penikmatan manfaat pembangunan yang adil dan merata. Tanpa adanya kontribusi perempuan di bidang politik maka proses–proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik lebih sulit di capai karena pengalaman dan kebutuhan perempuan lebih mudah disuarakan dan diperjuangkan oleh wakil dari perempuan. Keterlibatan perempuan di dunia politik indonesia sudah di dorong sejak lama. Kebijakan afirmatif action dengan ketentuan wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% calon perempuan, sudah termasuk dalam undang – undang nomor 12 tahun 2003, undang-undang nomor 10 tahun 2008 dan undang – undang no 5 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
- b. Tingkat Pendapatan yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menetapkan faktor ekonomi sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur pembangunan pemberdayaan gender di suatu negara. Aspek ekonomi dalam IDG diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan yang dapat menunjukkan bagaimana perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial, sumbangan pendapatan perempuan juga mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara dan kemampuan kontrol yang otonom.
- c. Peranan dalam kehidupan sosial yakni Perempuan sebagai tenaga profesional, profesionalitas perempuan di dunia kerja menjadi komponen indeks pemberdayaan gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan melalui persentase perempuan sebagai tenaga profesional disektor kerja formal. Kebanyakan perempuan memutuskan berkipra di sarana publik dan masuk dunia kerja memilih jenis pekerjaan yang berhubungan dengan jenis pekerjaan domestik seperti pengasuhan, perawatan dan pendidikan (Kemen PPPA 2020 a). Banyak perempuan juga memiliki kecenderungan bekerja di sektor informal, padahal partisipasi perempuan disektor formal menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan pemberdayaan perempuan.

Tabel 3.14.
Indeks Pembangunan Gender (IDG)
Kabupaten Rote Ndao

IDG	Tahun
	2024
Rote Ndao	49,07

Sumber : BPS Rote Ndao, 2024

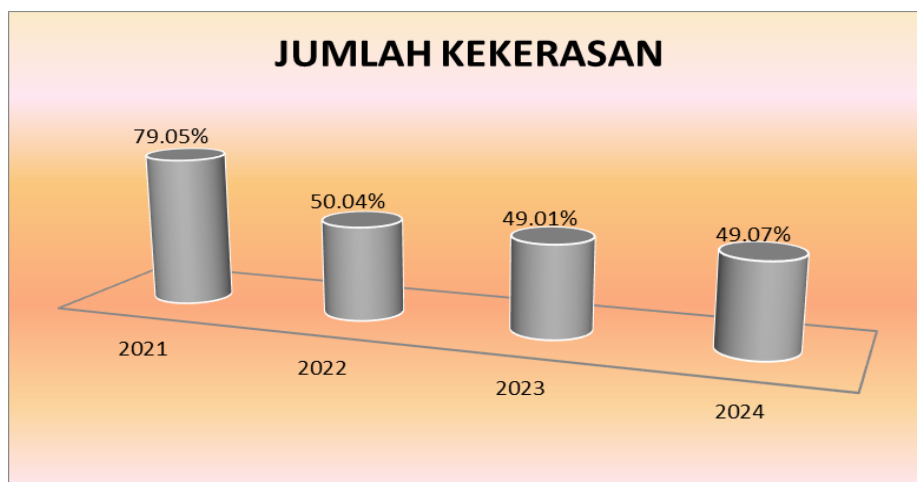
Analisis perbandingan kinerja dengan target tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja indeks pemberdayaan gender belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, indeks pemberdayaan gender ditargetkan sebesar 49,53 dan terealisasi sebesar 49,07 dengan capaian kinerja sebesar 99%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2024 sebesar 49,07 jika di bandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 49,01 menunjukkan bahwa capaian Tahun 2024 telah melampaui kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,06 dan capaian kinerja sebesar 100

Gambar 3.7.
Tren Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (IDG)
Tahun 2021-2024



Sumber : DP3AP2KB 2024

Tren realisasi Kekerasan Terhadap Perempuan selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif

yakni tahun 2021 (79,05) dan pada tahun 2022 (50,04) sampai dengan tahun 2023 (49,01) dan tahun 2024 (49,07)

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2024 sebesar 49,07 jika di bandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2025-2026) sebesar 51,20 menunjukkan bahwa target akhir RESTRA belum tercapai sebesar 95,84

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Budaya Patriarki sehingga masyarakat belum sepenuhnya percaya perempuan mampu berprestasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen/DPRD; dan
2. Perempuan yang belum percaya diri/kurang persiapan ikut bersaing saat pemilihan DPRD.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan sasaran ini ke depan, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pelatihan perempuan yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD latihan lebih sistematis dan terorganisir dengan baik; dan
- 2) Sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan di bidang Politik.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.40.199.000,- (*delapan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 36.034.500,- (*tiga puluh enam juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar 89,64%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat *digambarkan* dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja

Tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.15.
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
133,58	89,64	10,36	Efisien	1,87	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak** mencapai tingkat efisiensi sebesar **10,36%** atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio **1,87** sehingga dikategorikan **Efektif**.

SASARAN 2
Terwujudnya Pengendalian Penduduk

Terwujudnya Pengendalian Penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Tabel 3.16.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Pengendalian Penduduk

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTR A 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Total fertility rate (TFR)	%	3,27	3,40	3,11	91,47	3,40	95,11	91,47
Capaian Kinerja						91,47	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Terwujudnya Pengendalian Penduduk** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Total Fertility Rate (TFR). Penjelasan atas capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Total Fertility Rate (TFR)

Indikator TFR di Kabupaten Rote Ndao adalah Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun dibandingkan Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19).

TFR adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu atau PUS umur 15-49 tahun dalam salah satu keluarga yang mempunyai jumlah anak lebih dari dua orang.

Tabel 3.17.
Jumlah Total Fertility Rate (TFR dan PUS)

NO	KAB. ROTE NDAO	TFR
	2024	3,11
	2023	3,27
	2022	3,60
	2021	3,67

Sumber Data : Susenas hasil survey dan DP3AP2KB Des 2024

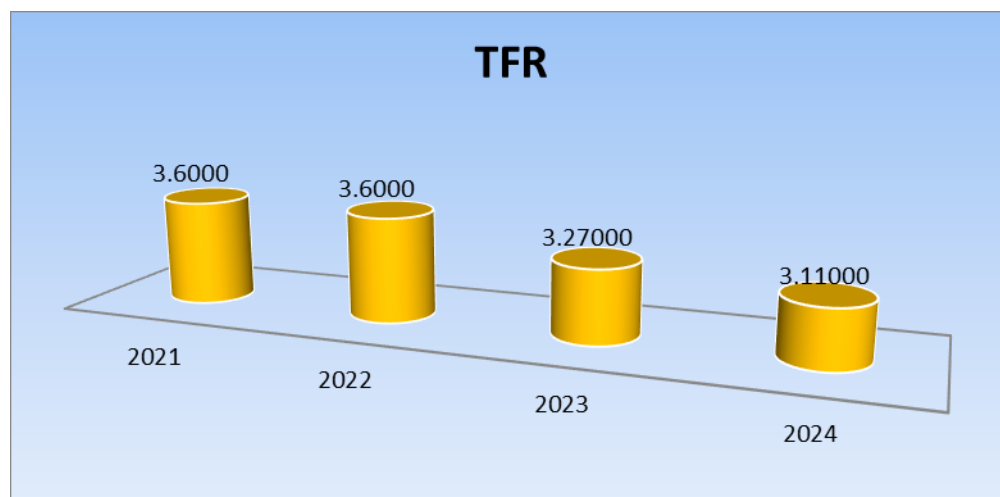
Analisis perbandingan kinerja dengan target tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Jumlah Total Fertility Rate (TFR) belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Jumlah Total Fertility Rate (TFR) ditargetkan sebesar 3,40 dan terealisasi sebesar 3,11 dengan capaian kinerja sebesar 91,47%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023.

Capaian Kinerja Jumlah Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2024 sebesar 3,11 jika di bandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 3,27 menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan kinerja sebesar 0,16 dan capaian kinerja sebesar 95,11

Gambar 3.8.
Data Jumlah Total Fertility Rate (TFR)
Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2024



Sumber : Hasil Survey Susenas

Tren realisasi Total Fertility Rate (TFR) selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang sama di tahun 2021-2022 dan mengalami penurunan kinerja di tahun 2023-2024.

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2023 sebesar 3,27% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 3,40%,

menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA 2019-2024 belum tercapai sebesar 91,47

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/ Peningkatan

pencapaian kinerja sasaran ini sangat di pengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Semua perangkat daerah berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kampung KB
2. Adanya dukungan dana yang memadai dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan di kampung KB.
4. Jumlah Anak harus 1 sampai 2 Anak
5. Pasangan Usia Subur yang berumur ≤ 35 tahun
6. Pengerakan konseling bagi PUS
7. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
8. Menekan Angka kelahiran
9. Pencegahan Stunting, Gizi Buruk
10. Adanya KIE Lewat media
11. Peran Tenaga Bidan

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

- Rendahnya keikutsertaan ber KB pada PUS
- PUS yang mengikuti KB sudah mempunyai anak lebih dari dua (2) orang serta adat istiadat yang mempengaruhi sehingga banyak keluarga/PUS yang memiliki anak lebih dari 2 orang
- Minimnya Pengetahuan Pasangan Usia Subur yang masih rendah
- Tenaga Penyuluh Lapangan masih sangat kurang
- Masih ada sebagian PUS yang menganggap KB adalah hal yang tabuh
- Efek samping dari ber – KB (haid tidak teratur, BB meningkat)

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan sasaran ini ke depan, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendewasaan usia perkawinan (21 tahun – 25 tahun)
- Jaga jarak kelahiran
- Meningkatkan konseling terhadap pasangan usia subur
- Perlu adanya ditambahkan Penyuluh Lapangan sesuai jumlah desa
- Meningkatkan pembinaan pada peserta KB aktif

- Meningkatkan konseling KB bagi PUS
- Pembinaan Poktan
- Lebih meningkatkan konseling bagi PUS tentang manfaat dan efek samping
- Meningkatkan pelayanan yang lebih Optimal

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.928.281.800,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.657.335.552,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 72,21%.

Tabel 3.18.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Terwujudnya Pengendalian Penduduk

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
91,47	90,17	9,06	Efisien	1,01	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Pengendalian Penduduk** mencapai tingkat efisiensi sebesar **9,06%** atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

SASARAN 3**Meningkatnya Kualitas Dan Akseibilitas Pelayanan KB, Ketahanan Keluarga Dan Kesehatan Reproduksi Serta Mengendalikan Angka Kelahiran**

Meningkatnya Kualitas dan akseibilitas pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan keluarga berencana, ketahanan serta kesejahteraan Keluarga dengan demikian dapat mengendalikan menekan angka kelahiran maupun jumlah kelahiran.

Tabel 3.19.

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan Kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran**

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Rasio akseptor KB	%	52,93	58	50,32	87	58	95	87
3.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	52,93	57,0	50,32	88	57,0	95	88
4.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	18,50	10	20,30	-83	18	110	113

5.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	25,70	5,30	20,04	-258	6,30	78	-258
Rata-Rata Capaian Kinerja						-13,15	Sangat Rendah		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan Kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran** terdapat 5 (lima) indikator kinerja. Penjelasan atas capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Indikator Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB di Kabupaten Rote Ndao adalah Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB dibandingkan jumlah semua perangkat daerah.

Terkait Indikator Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB di Kabupaten Rote Ndao yakni Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui kampung KB adalah perangkat daerah yang melakukan pembangunan atau pekerjaan atau kegiatan pada kampung KB yang sudah dibentuk di masing – masing desa kecamatan. Dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat di kampung KB.

Tabel 3.20.
Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam
pembangunan daerah melalui kampung KB
Tahun 2024

NO	NAMA STAKEHOLDERS	INTERFENSI
1	DINAS PERKIM Kabupaten Rote Ndao	Bantuan Rumah Layak Huni yang diberikan kepada 29 Kampung KB
2	Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao	Bantuan PKH dan Bansos lainnya untuk masyarakat di 29 Kampung KB
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	Pembangunan dan rehap fasilitas kesehatan di kampung KB
4	Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao	Bantuan Bibit Tanaman Pangan di Kampung KB
5	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rote Ndao	Memberikan bantuan bencana kepada

		kampung KB yang terdampak bencana alam
6	Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao	Bantuan ternak berupa sapi bali bibit, kambing PE (Peranakan Etawa) untuk kelompok di desa/ kampung KB
7	Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao	Pembangunan/ rehap gedung sekolah di desa/ Kampung KB
8	Dinas DUKCAPIL Kabupaten Rote Ndao	Pelayanan E-KTP di masing-masing Desa/ Kampung KB
9	Dinas NAKERTRANS Kabupaten Rote Ndao	Memfasilitasi Perekrutan Tenaga Kerja yang ada di Kampung KB
10	Dinas KOPERINDAK Kabupaten Rote Ndao	Pelatihan dan Pemberdayaan IKM yang ada di Kampung KB
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao	Pembangunan dan Pelestarian Destinasi Wisata yang berada pada wilayah kampung KB
12	Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao	Pemberian Dana Desa
13	Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao	Pembangunan tambatan perahu di pesisir pantai Desa/ Kampung KB
14	Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao	Pembangunan Sanitasi yang layak untuk desa/kampung KB
15	BAPELITBANG Kabupaten Rote Ndao	Interfensi Anggaran Kampung KB
16	Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao	Pemberian bantuan bibit tanaman hortikultura
17	Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao	Bantuan alat penangkap ikan dan juga perahu di wilayah pesisir desa/kampung KB
18	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Menyediakan fasilitas pengaduan untuk perempuan dan anak (P2TP2A) Kab. Rote Ndao
19	Badan Statistik Kabupaten Rote Ndao	Melakukan Pendataan Penduduk Pada Desa/ Kampung KB
20	Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao	Bantuan pengurusan sertifikat tanah
21	Departemen Keagamaan Kabupaten Rote Ndao	Membantu memberikan penyuluhan/ pembinaan keagamaan kepada masyarakat.
22	Bagian LPSE Kabupaten Rote Ndao	Keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat.
23	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao	Melakukan pemantuan terkait kesejahteraan sosial di masyarakat/ kampung KB

24	Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao	Melakukan Koordinasi terkait pembangunan oleh pemerintah di kampung KB
25	Kecamatan Lobalain	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
26	Kecamatan Rote Barat Laut	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
27	Kecamatan Loaholu	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
28	Kecamatan Rote Barat Daya	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
29	Kecamatan Rote Barat	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
30	Kecamatan Ndao Nuse	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
31	Kecamatan Rote Selatan	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
32	Kecamatan Rote Tengah	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
33	Kecamatan Pantai Baru	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
34	Kecamatan Rote Timur	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
35	Kecamatan Landu Leko	Pemantauan dan pembinaan desa/ kampung
36	Puskesmas Korbafo	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
37	Puskesmas Oele	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
38	Puskesmas Eahun	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
39	Puskesmas Oelaba	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
40	Puskesmas Delha	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
41	Puskesmas Sonimanu	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
42	Puskesmas Sotimori	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
43	Puskesmas Ndao	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
44	Puskesmas Baa	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.

45	Puskesmas Feapopi	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
46	Puskesmas Batutua	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
47	Puskesmas Busalangga	Sosialisasi dan KIE tentang penyakit penular, Penyakit tidak menular, KIA, dan pengobatan.
48	Balai Penyuluhan Kecamatan Lobalain	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
49	Balai Penyuluhan Kecamatan Rote Barat Laut	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
50	Balai Penyuluhan Kecamatan Rote Barat Daya	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
51	Balai Penyuluhan Kecamatan Rote Barat	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
52	Balai Penyuluhan Kecamatan Ndao Nuse	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
53	Balai Penyuluhan Kecamatan Rote Selatan	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
54	Balai Penyuluhan Kecamatan Rote Tengah	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
55	Balai Penyuluhan Kecamatan Pantai Baru	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
56	Balai Penyuluhan Kecamatan Rote Timur	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung KB
57	Balai Penyuluhan Kecamatan Landu Leko	Tempat pertemuan kelompok kerja dan POKTAN (BKB, BKR dan BKL) serta kader terkait perkembangan kampung

Sumber : DP3AP2KB 2024

Analisis perbandingan kinerja dengan target tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Tahun 2024 sebesar 100% jika di bandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya (Tahun 2023), maka menunjukkan realiasasi Tahun 2024 sama dengan Tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.9.

Tren Data Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Tahun 2021-2024



Sumber : DP3AP2KB 2024

Tren realisasi Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Rote Ndao selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama sebesar 100 persen.

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2025-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

2. Rasio Aseptor KB

Indikator Rasio Aseptor KB di Kabupaten Rote Ndao adalah Jumlah Aseptor KB dibandingkan Jumlah Pasangan Usia Subur.

Rasio Aseptor KB adalah angka pemakaian alat kontrasepsi modern yang digunakan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah Rasio Aseptor KB sebanyak 9.033 dari Jumlah PUS sebanyak 17952 PUS Kab Rote Ndao.

Tabel 3.21.
Tabel Rasio Aseptor KB Per-Kecamatan
di Kabupaten Rote Ndao

RASIO AKSEPTOR KB
S.D BULAN : DESEMBER – 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	JUMLAH PESERTA PASANGAN USIA SUBUR (PUS)	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	%
				SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLANT	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL		
1	ROTE BARAT DAYA	1382	2780	644	33	11	629	9	4	52	0	1382	9	49,71
2	ROTE BARAT LAUT	979	1921	349	46	14	492	8	1	69	0	979	3	50,96
3	LOBALAIN	1685	3890	597	24	6	819	107	1	131	1	1686	8	43,32
4	ROTE TENGAH	759	1148	302	22	3	386	12	0	34	0	759	1	66,11
5	PANTAI BARU	1008	1899	308	124	13	499	15	0	49	0	1008	13	53,08
6	ROTE TIMUR	842	1682	337	35	2	424	23	0	21	0	842	4	50,06
7	ROTE BARAT	526	1378	195	57	8	237	10	2	17	0	526	4	38,17
8	ROTE SELATAN	463	712	162	88	6	164	8	1	34	0	463	1	65,03
9	NDAO NUSE	200	402	136	16	0	45	0	0	3	0	200	0	49,75
10	LANDU LEKO	416	670	157	23	4	228	0	0	4	0	416	0	62,09

11	LOAHOLU	773	1470	195	35	51	454	4	2	32	0	773	4	52,59
JUMLAH TOTAL		9033	17952	3382	503	118	4377	196	11	446	1	9034	47	50,32

Sumber : DP3AP2KB 2024

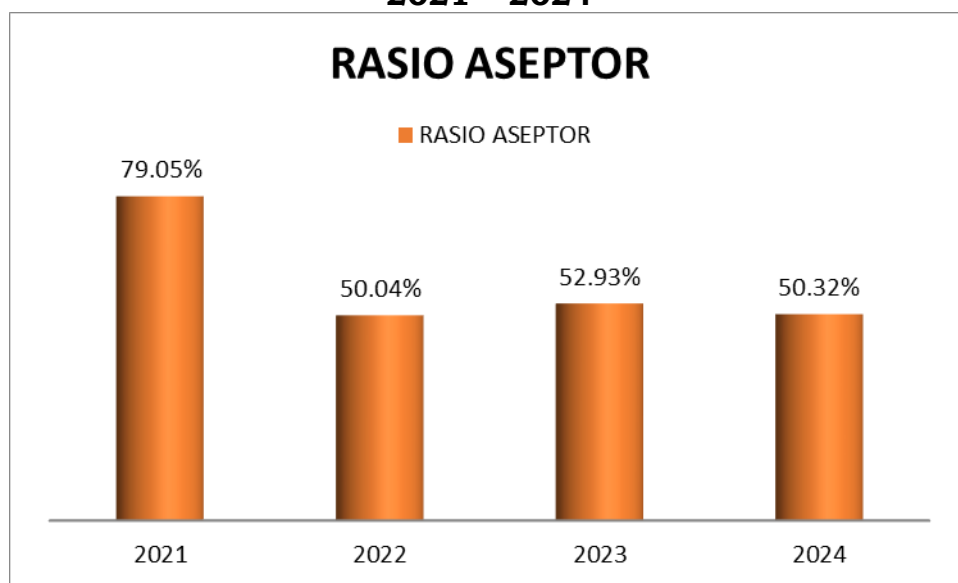
Analisis perbandingan kinerja dengan target tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Rasio Aseptor KB belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 indikator kinerja Rasio Aseptor KB ditargetkan sebesar 58% dan terealisasi 50,32% dengan capaian kinerja sebesar 87%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

Capaian Kinerja Rasio Aseptor KB Tahun 2024 sebesar 52,32% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 52,93 menunjukkan bahwa capaian Tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja Tahun sebelumnya dengan penurunan kinerja sebesar 0,61% dan capaian kinerja sebesar 95%

Gambar 3.10.
Data Trend Rasio Aseptor KB
2021 – 2024



Sumber : DP3AP2KB 2024

Tren realisasi Indikator Rasio Aseptor KB selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja fluktuatif yakni tahun 2021, 2023 dan 2024 mengalami peningkatan kinerja sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kinerja.

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Rasio Aseptor KB pada tahun 2024 sebesar 50,32% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 58%, maka menunjukkan bahwa target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 telah tercapai sebesar 87%.

3. Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 Indikator Akseptor KB adalah Jumlah peserta KB aktif dibandingkan jumlah pasangan usia subur yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah 15-49 Indikator Aseptor KB adalah angka pemakaian alat kontrasepsi modern yang digunakan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah Pemakai Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 Indikator Aseptor KB sebanyak 9.033 dari Jumlah PUS sebanyak 17952 PUS Kab Rote Ndao.

Tabel 3.22.
Pemakai Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49
di Kabupaten Rote Ndao

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	JUMLAH PESERTA PASANGAN USIA SUBUR (PUS)	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	%
				SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLANT	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL		
1	ROTE BARAT DAYA	1382	2780	644	33	11	629	9	4	52	0	1382	9	49,71
2	ROTE BARAT LAUT	979	1921	349	46	14	492	8	1	69	0	979	3	50,96
3	LOBALAIN	1685	3890	597	24	6	819	107	1	131	1	1686	8	43,32
4	ROTE TENGAH	759	1148	302	22	3	386	12	0	34	0	759	1	66,11
5	PANTAI BARU	1008	1899	308	124	13	499	15	0	49	0	1008	13	53,08
6	ROTE TIMUR	842	1682	337	35	2	424	23	0	21	0	842	4	50,06
7	ROTE BARAT	526	1378	195	57	8	237	10	2	17	0	526	4	38,17
8	ROTE SELATAN	463	712	162	88	6	164	8	1	34	0	463	1	65,03
9	NDAO NUSE	200	402	136	16	0	45	0	0	3	0	200	0	49,75
10	LANDU LEKO	416	670	157	23	4	228	0	0	4	0	416	0	62,09
11	LOAHOLU	773	1470	195	35	51	454	4	2	32	0	773	4	52,59
JUMLAH TOTAL		9033	17952	3382	503	118	4377	196	11	446	1	9034	47	50,32

Sumber : DP3AP2KB 2024

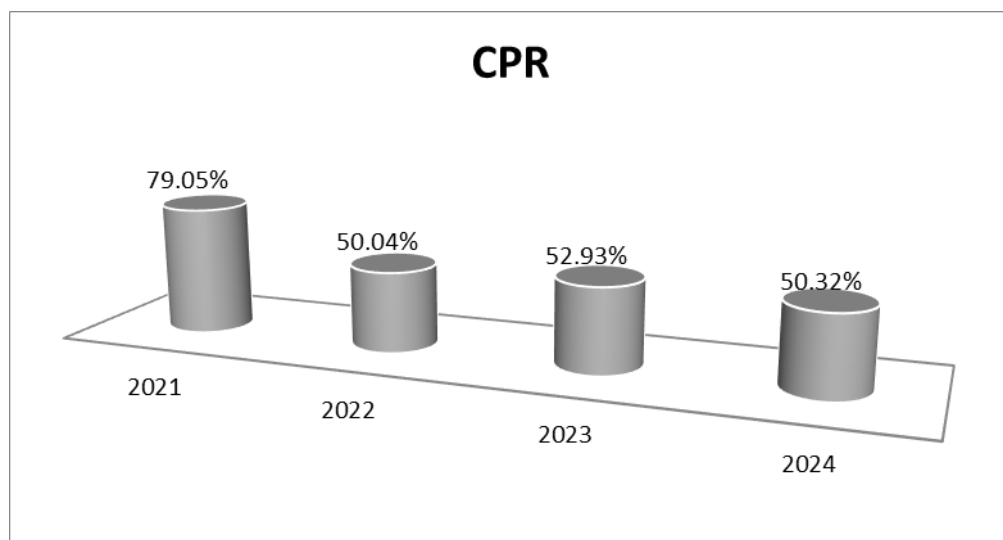
Analisis perbandingan kinerja dengan target tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 belum melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Indikator kinerja Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 di Kabupaten Rote Ndao ditargetkan sebesar 57,0 dan terealisasi 50,32 dengan capaian kinerja sebesar 88%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

Capaian Kinerja Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 Tahun 2024 sebesar 50,32% jika di bandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 52,93 menunjukkan bahwa capaian Tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja Tahun sebelumnya yaitu dengan penurunan kinerja sebesar 2,61% dan capaian kinerja sebesar 95 dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.11.
Data Trend Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah 15-49
di Kabupaten Rote Ndao
2021 – 2024



Sumber : DP3AP2KB 2024

Tren realisasi Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja fluktuatif yakni tahun 2021,2023,2024 mengalami peningkatan kinerja sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kinerja.

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 pada tahun 2024 sebesar 50,32% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 57,0%, maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 sebesar 88.

4. Indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)

Indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) di Kabupaten Rote Ndao Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) adalah Jumlah peserta KB aktif dibandingkan jumlah pasangan usia subur yang terdapat di kabupaten Rote Ndao.

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) adalah angka pemakaian alat kontrasepsi modern yang digunakan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) sebanyak 9.033 dari Jumlah PUS sebanyak 17,952 PUS Kab Rote Ndao.

Analisis perbandingan realisi dengan target tahun 2024

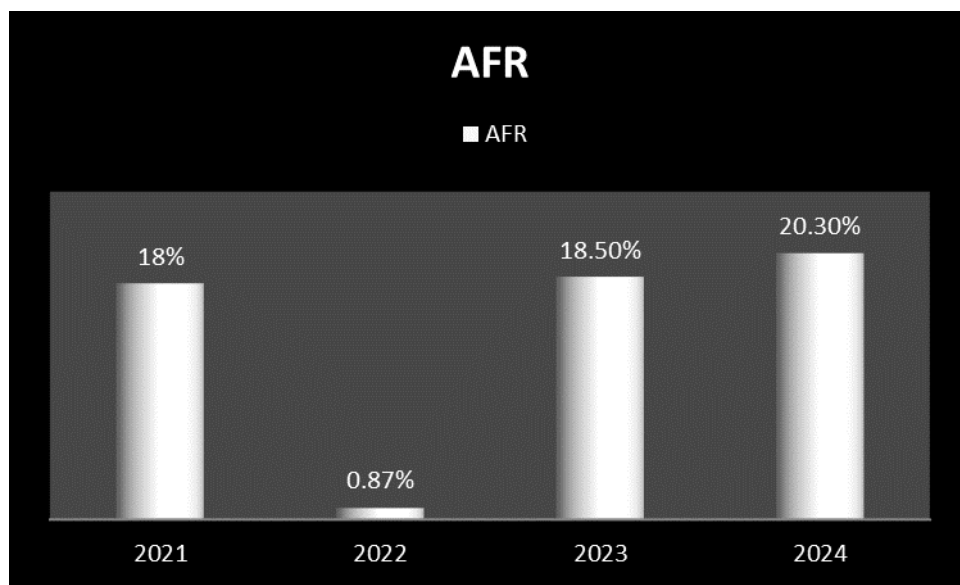
Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) ditargetkan sebesar 10 dan terealisasi sebesar 20,30 dengan capaian kinerja sebesar -83%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023.

Capaian Kinerja capaian Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) Tahun 2024

sebesar 20,30% jika di bandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 18,50 menunjukkan bahwa capaian Tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja Tahun sebelumnya dengan penurunan kinerja sebesar 1,8 dan capaian kinerja sebesar 110

Gambar 3.12.
Tren Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000
perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)
Tahun 2021 – 2024



Sumber : DP3AP2KB 2024

Tren realisasi Indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukan capaian yang mengalami kinerja fluktuatif yakni tahun 2022 mengalami peningkatan kinerja dan tahun 2021,2023 dan 2024 mengalami penurunan kinerja.

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) pada tahun 20234 sebesar 20,30% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 18 %, maka menunjukan bahwa target kinerja tahun akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 113.

5. Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Rote Ndao adalah Jumlah PUS yang belum ber-KB namun belum terlayani dibandingkan jumlah Pasangan Usia Subur yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao.

Prosentasi PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmet need) sebanyak 3597 dibandingkan dengan Jumlah PUS sebanyak 17952 PUS di Kab Rote Ndao (20,04%).

Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB namun belum terpenuhi (Unmet Need) dapat mempengaruhi peningkatan angka kelahiran (TRF). Untuk itu PUS Unmet Need harus mendapat prioritas utama dalam pelayanan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta menurunkan angka kelahiran Ibu. Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) kepada PUS Unmet Need harus ditingkatkan.

Tabel 3.23.
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

NO	KAB. ROTE NDAO	JUMLAH PUS	PUS UNMET NEED	%
1	TAHUN 2021	19211	2.594	13,50
2	TAHUN 2022	18176	7.186	39,53
3	TAHUN 2023	18130	4.660	25,70
4	TAHUN 2024	17952	3597	20,04

Sumber : DP3AP2KB 2024

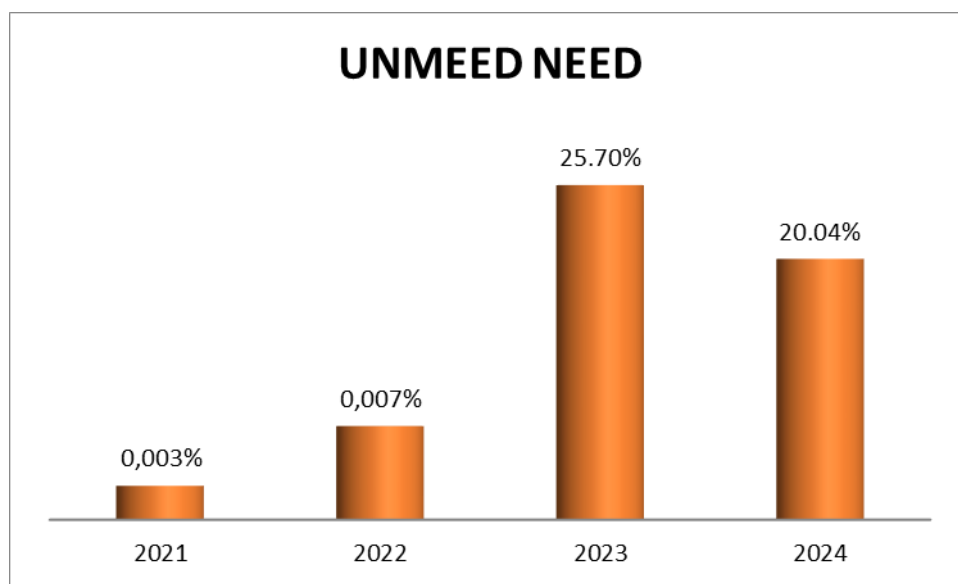
Analisis perbandingan kinerja dengan target tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan sebesar 5,30 dan terealisasi sebesar 20,04 dengan capaian kinerja sebesar -258%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

Capaian Kinerja capaian Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024 sebesar 20,04% jika di bandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) sebesar 25,70 menunjukkan bahwa capaian Tahun 2024 telah melampaui capaian kinerja Tahun sebelumnya dengan peningkatan kinerja sebesar 5,66% dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 78%

Gambar 3.13.
Tren Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2021-2024



Sumber : DP3AP2KB 2024

Tren realisasi Angka Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja fluktuatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup positif dan pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan kinerja.

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi indikator Angka Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) pada tahun 2024 sebesar 20,04% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 6,50%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar -258%.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat di pengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Semua perangkat daerah berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kampung KB
2. Adanya dukungan dana yang memadai dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan di kampung KB.
4. Jumlah Anak harus 1 sampai 2 Anak
5. Pasangan Usia Subur yang berumur ≤ 35 tahun
6. Pengerakan konseling bagi PUS
7. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
8. Menekan Angka kelahiran
9. Pencegahan Stunting, Gizi Buruk
10. Adanya KIE Lewat media
11. Peran Tenaga Bidan

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

- Rendahnya keikutsertaan ber KB pada PUS
- PUS yang mengikuti KB sudah mempunyai anak lebih dari dua (2) orang serta adat istiadat yang mempengaruhi sehingga banyak keluarga/PUS yang memiliki anak lebih dari 2 orang
- Minimnya Pengetahuan Pasangan Usia Subur yang masih rendah
- Tenaga Penyuluh Lapangan masih sangat kurang
- Masih ada sebagian PUS yang menganggap KB adalah hal yang tabuh
- Efek samping dari ber – KB (haid tidak teratur, BB meningkat)

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan sasaran ini ke depan, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendewasaan usia perkawinan (21 tahun – 25 tahun)
- Jaga jarak kelahiran
- Meningkatkan konseling terhadap pasangan usia subur
- Perlu adanya ditambahkan Penyuluh Lapangan sesuai jumlah desa
- Meningkatkan pembinaan pada peserta KB aktif
- Meningkatkan konseling KB bagi PUS
- Pembinaan Poktan

- Lebih meningkatkan konseling bagi PUS tentang manfaat dan efek samping
- Meningkatkan pelayanan yang lebih Optimal

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program **Program Pembinaan Keluarga Berencana** dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 4.915.681.800,-** (empat milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 3.645.876.552,-** (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar **74,17%**.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja Tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.24.

**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas dan aksebilitas pelayanan KB,
ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan
angka kelahiran**

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
-13,15	74,17	25,83	Efisien	-0,2	Kurang Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas dan aksebilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran** mencapai tingkat efisiensi sebesar 25,83% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung

menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan **Kurang Efektif**.

SASARAN 4

Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-Undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari Negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, telah dilakukan upaya dan tindak lanjut atas perlindungan perempuan dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini.

Tabel 3.25.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2025	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2025
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	88	97,00	100	103	100	114	100
Capaian Kinerja						103	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu presentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Presentasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani

Indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani adalah Jumlah Indikator Persentase Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum di Kabupaten Rote Ndao adalah Jumlah Korban membutuhkan layanan bantuan hukum dibandingkan Jumlah Korban yang mendapatkan bantuan hukum.

Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani adalah memberi pedoman pelayan penegakan hukum dan bantuan hukum kepada klien termasuk pendampingan litigasi (proses hukum di pengadilan) dan non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) memberikan pedoman rujukan ke instansi penegak hukum. Terpenuhinya penegakan hukum dan bantuan hukum serta pemberian nasehat hukum yang berkualitas terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum, advokad, atau relawan pendamping untuk melakukan proses pendampingan korban dan atau saksi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif Gender.

Tabel 3.26.
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Yang Tertangani

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN	JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERTANGANI	KET
1	ROTE TIMUR	8	8	
2	PANTAI BARU	19	19	
3	LANDU LEKO	0	0	
4	ROTE TENGAH	10	10	
5	ROTE SELATAN	5	5	
6	LOBALAIN	31	31	
7	ROTE BARAT LAUT	12	12	
8	ROTE BARAT DAYA	19	19	
9	ROTE BARAT	5	5	
10	NDAO NUSE	1	1	
11	LOAHOLU	13	13	
T O T A L		123	123	

Sumber : DP3AP2KB 2024

Berdasarkan tabel diatas maka untuk menghitung Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum sebagai berikut :

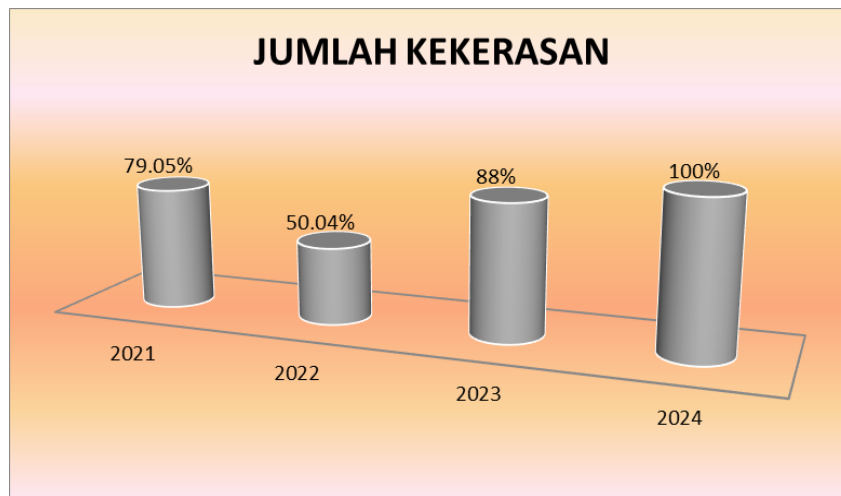
Analisis perbandingan realisasai dengan target tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani ditargetkan sebesar 97,00 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 103%.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja capaian Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani Tahun 2024 sebesar 97% jika dibandingkan dengan capaian kinerja (tahun 2023) sebesar 88 menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 9%, dengan capain kenerja sebesar 114%

Gambar 3.14.
Tren Cakupan Presentase Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang tertangani
Tahun 2021 – 2024



Sumber : DP3AP2KB 2024

Tren realisasi Cakupan Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja periode 2021, 2023, 2024 dan mengalami penurunan di tahun 2022.

Analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024

Realisasi Indikator Cakupan Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100% maka menunjukkan bahwa telah mencapai target akhir tahun RENSTRA 2019-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/ Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran dan Perubahan pola pikir masyarakat untuk mencari bantuan dan melaporkan kekerasan yang dialami.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menolong korban kekerasan.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Kurangnya konselor terlatih, pendamping hukum dan para legal
2. Jumlah tenaga pendamping pada pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak sangat sedikit dan berfokus di kabupaten.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan sasaran ini ke depan, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelatihan tenaga konselor, para legal dan pendamping hukum dalam penanganan kasus
2. Menjalin kemitraan dengan LBH di Kab. Rote Ndao
3. Pembentukan satuan tugas di desa dan kecamatan untuk menjangkau korban yang jauh dari pusat pelayanan pendampingan korban.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan dukungan anggaran sebesar Rp.305.000.000,- (*tiga ratus lima juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 252.763.675 (*dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau sebesar 82,87%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja Tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.27.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang
Tertangani

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
103	97,72	2,28	Efisien	1,1	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak** mencapai tingkat efisiensi sebesar **2,28%** atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

B. Realisasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Adapun realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2024 bersumber dari APBD dengan rinciannya dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.28.
Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
1.	BELANJA DAERAH		9.875.616.849	8.069.689.129	81,71
	8.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.733.817.154	2.388.690.222	87,38
		2.1.2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.360.979.054	2.063.391.972	87,40
		2.1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.979.054	1.978.011.972	87,56
		2.1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	102.000.000	85.380.000	83,71
		2.1.3 KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	9.600.000	9.600.000	100,00
		2.1.3.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	100,00
		2.1.5 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	154.325.600	152.205.850	98,63

		2.1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	3.455.000	69,17
		2.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.296.600	19.198.450	99,49
		2.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	30.000.000	100,00
		2.1.5.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.034.000	99.552.400	99,52
		2.1.6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.474.500	26.736.800	75,37
		2.1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	975.000	975.000	100,00
		2.1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.499.500	25.761.800	74,67
		2.1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	173.438.000	136.755.600	78,85
		2.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.438.000	136.755.600	78,85
	08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		40.199.000	36.034.500	89,64
	02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		20.000.000	20.000.000	100,00
	02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		20.000.000	20.000.000	100,00
	02.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		20.199.000	16.034.500	79,38
	03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		20.199.000	16.034.500	79,38

	08.03	Program Perlindungan Perempuan		305.000.000	252.763.675	82,87
		2.01	KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.000.000	60.440.000	92,98
		01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	60.440.000	92,98
		2.02	KEGIATAN PENYEDIA LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	188.360.000	140.709.675	74,70
		02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	188.360.000	140.709.675	74,70
		2.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.640.000	51.614.000	99,95
		02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.640.000	51.614.000	99,95
	08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		20.000.000	17.407.000	87,04
		2.02	KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	20.000.000	17.407.000	87,04
		02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	17.407.000	87,04
	08.07	Program Perlindungan Khusus Anak		373.928.000	365.411.000	97,72

		2.01	KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.728.000	151.416.000	95,39
		01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	93.728.000	91.633.500	97,77
		02.02	Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pencegahan KTA	65.000.000	59.782.500	91,97
		2.01	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI	150.800.000	149.721.000	99,28
		01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	150.800.000	149.721.000	99,28
		2.01	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.400.000	64.274.000	99,80
		01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/kota	64.400.000	64.274.000	99,80
	14.02	Program Pengendalian Penduduk		289.399.900	244.989.800	84,65
		2.02	KEGIATAN PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	289.399.900	244.989.800	84,65
		02.12	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	59.855.000	99,76
		02.13	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	89.400.000	80.880.000	90,47
		02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	139.999.900	104.254.800	74,47
	14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		4.938.179.800	3.645.876.552	73,83

		2.01	KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.102.468.800	644.064.052	58,42
			01.01 Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Stakeholders dan Mitra Kerja	226.468.700	100.193.306	44,24
			01.02 Sub Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.500.000	0	0,00
			01.04 Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	128.500.100	117.635.100	91,54
			01.06 Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	150.000.000	123.821.500	82,55
			01.07 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	496.000.000	254.139.146	51,24
			01.08 Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	48.275.000	60,34
		2.02	KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	886.975.000	871.195.500	98,22
			02.02 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	499.975.000	487.369.700	97,48
			02.02 Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	387.000.000	383.825.800	99,18
		2.03	KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.042.236.000	1.304.864.200	63,89

			03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000	11.459.000	84,88
			03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.055.266.000	533.146.200	50,52
			03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	541.198.000	515.193.000	95,19
			03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.800.000	4.200.000	26,58
			03.09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	416.472.000	240.866.000	57,83
		2.04	KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESETARAAN BER-KB		906.500.000	825.752.800	91,09
			04.03	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas	450.000.000	393.039.300	87,34
			04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	456.500.000	432.713.500	94,79
	14.4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			1.175.092.995	1.118.516.380	95,19
		2.01	KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEHJATERAAN KELUARGA		1.175.092.995	1.118.516.380	95,19
			01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000	0	0,00

			01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	326.947.995	321.080.792	98,21
			01.03	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	377.000.000	371.664.088	98,58
			01.04	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	461.545.000	425.771.500	92,25
TOTAL					9.875.616.849	8.069.689.129	81,71

C. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.29.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja				Tingkat Efektifitas Kinerja		
									Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori		Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
										Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 - 10	13	14	15 = 5 / 11	16 = 7 / 11	17	
Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point)	91,18		-	-	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN / Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	N/A	-								
					(31,46)													

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	2.	Presentase Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	-	168	99	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN / Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40.199.000	36.034.500	89,64	4.164.500	10,36	Efisien	0,00	1,10	Efektif
						Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-								
	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point)	-	49,07		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A								

Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk		4.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	-102		-		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK / Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga / Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga / Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	289.399.900	244.989.800	84,65	44.410.100	15,35	Efisien	-	-	Kurang Efektif
	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	5	Total fertility rate (TFR) (%)	-		91,47		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) / Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat & Obat Kontrasepsi & Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	12.600.000	11.459.000	90,94	1.141.000	9,06	Efisien	0,00	-	Kurang Efektif

Meningkatnya kualitas Dan aksesibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	6	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	-	100	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA / Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB / Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB/ Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB / PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) / Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) / Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.915.681.800	3.645.876.552	74,17	1.269.805.248	25,83	Efisien	0,00	-	Kurang Efektif
---	---	---	---	-----	---	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------	------	---	----------------

		7	Rasio Aseptor KB	-		87	-	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) / Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) / Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat & Obat Kontrasepsi & Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB / Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya / Sub Kegiatan Promosi & Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan & Kelompok Kegiatan										
		8	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah 15-49	-		88	0	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) / Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										

		9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	-		(83)	0	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) / Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya									
		10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	-		-258		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) / Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Promosi & Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan & Kelompok Kegiatan									

Meningkatkan Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak;			Presentase Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	(83,22)			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN / KEGIATAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota / KEGIATAN PENYEDIA LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota / KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	305.000.000	252.763.675	82,87	52.236.325	17,13	Efisien	-	-	Kurang Efektif
---	--	--	--	---------	--	--	---	-------------	-------------	-------	------------	-------	---------	---	---	----------------

	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	11	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	-	-	103	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK / Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota / Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.928.000	365.411.000	97,72	8.517.000	2,28	Efisien	0,00	-	Kurang Efektif
	Kinerja Penunjang Lainnya			-	-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	3.938.808.149	3.513.154.602	89,19	425.653.547	10,81	Efisien			
	Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan			(31,46)	(31,46)		Total Anggaran	9.875.616.849	8.069.689.129	81,71	1.805.927.720	18,29	EFISIEN	(0,58)	1,04	EFEKTIF

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			78,74	78,75										
-----------------------------------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp.9.875.616.849,- (*sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.8.069.689.129,- (*delapan milyar enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 81,71%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp.1.805.927.720,- (*satu milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 18,29% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (302,22%) terhadap realisasi anggaran (0,58%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,04 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

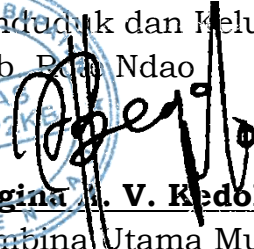
Pencapaian indikator kinerja Sasaran “Terwujudnya Keadilan Gender, Perlindungan Anak serta Suksesnya Program Keluarga Berencana menuju masyarakat Rote Ndao yang Bermartabat dan Sejahtera” yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2024 menunjukkan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran ini adalah **302,22%** atau dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian Tujuan **Mewujudkan Keadilan Gender dalam Pembangunan** sebesar 91,18% (*Sangat Tinggi*), Tujuan **Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk** sebesar -102% (*Sangat Rendah*), Tujuan **Meningkatkan Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak** sebesar -69,69% (*Sedang*), sasaran **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak** sebesar 133,58% (*Sangat Tinggi*), Sasaran **Terwujudnya Pengendalian Penduduk** sebesar 108,53% (*Sangat Tinggi*), sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan Kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran** sebesar -13,15% (*Sangat Rendah*), sasaran **Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak** sebesar 103% (*Sangat Tinggi*), dan Meskipun demikian terdapat hambatan dan kendala namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan agar proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Rote Ndao




Regina A. V. Kedoh, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800827 199912 2 003